



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 1715-1729

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pentingnya Bahasa Baku dalam Dokumen Hukum: Aspek Legal dan Konsekuensinya

Ahmad Rico Fuady^{1✉}, Brilliant Rahadian Rabbani², Zalva Reina³, Marcella Novia⁴,

Eni Nurhayati⁵

UPN Veteran Jawa Timur

Email: ahmadricofuady@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Abstract: Penelitian ini mengkaji pentingnya bahasa baku dalam dokumen hukum dan dampaknya dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyadari bahwa metode kuantitatif tidak dapat sepenuhnya memahami nuansa linguistik dan implikasi hukum dari penggunaan bahasa baku. Oleh karena itu, metode deskriptif kualitatif dipilih untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang kompleksitas hubungan antara bahasa dan hukum. Dalam penelitian ini, kami menganalisis dokumen hukum untuk mengidentifikasi penggunaan bahasa baku dan dampaknya pada interpretasi hukum. Metode ini mengeksplorasi linguistik dan hukum yang terlewatkan dalam analisis kuantitatif. Penelitian menunjukkan pentingnya bahasa baku dalam validitas dokumen hukum. Bahasa juga mempengaruhi konsekuensi dengan pemilihan kata dan struktur kalimat. Kesimpulan ini membantu memahami pengaruh bahasa baku pada hukum. Implikasinya dapat membantu praktisi hukum dan pembuat kebijakan meningkatkan dokumen hukum. Penelitian ini penting bagi literatur bahasa dan hukum, menekankan pentingnya bahasa baku dalam dokumen hukum

Kata Kunci: *Dokumen, Hukum, Kata Baku, Legal.*

Abstract

This research examines the importance of standardized language in legal documents and its impact using a descriptive qualitative method. This research realizes that quantitative methods cannot fully understand the linguistic nuances and legal implications of using standardized language. Therefore, qualitative descriptive methods were chosen to provide a comprehensive and in-depth understanding of the complexity of the relationship between language and law. In this study, we analyzed legal documents to identify the use of standardized language and its impact on legal interpretation. This method explores linguistics and law that are missed in quantitative analysis. The research shows the importance of standardized language in the validity of legal documents. Language also influences consequences with word choice and sentence structure. This conclusion helps understand the influence of standardized language on law. The implications can help legal practitioners and policy makers improve legal documents. This research is important to the language and law literature, emphasizing the importance of standardized language in legal documents.

Keyword: *Document, Standard word, Law, Legal*

PENDAHULUAN

"Pentingnya Bahasa Baku dalam Dokumen Hukum: Aspek Legal dan Konsekuensinya" memberikan latar belakang yang kuat mengenai peran penting bahasa baku dalam konteks dokumen hukum. Bahasa baku merujuk pada bentuk bahasa yang diakui dan diadopsi secara resmi oleh lembaga-lembaga hukum, pemerintah, dan organisasi internasional. Bahasa memainkan kiprah yang sangat krusial pada perkembangan peradaban global. Selain itu, bahasa jua berfungsi menjadi penghubung antara banyak sekali komunitas dan lingkungan sosial (Nurhayati, et al, 2023). Dalam banyak negara, bahasa baku adalah fondasi yang memastikan kejelasan, ketepatan, dan otoritas dokumen hukum. Oleh karena itu, jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak positif penggunaan bahasa baku dalam dokumen hukum terhadap kepastian hukum, interpretasi yang benar, dan perlindungan hak individu.

Salah satu sumber yang relevan untuk jurnal ini adalah "Legal Language and Legal Writing: An Introduction" oleh Reed Dickerson. Buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang peran bahasa baku dalam konteks hukum, dan bagaimana penggunaan yang tepat dari bahasa tersebut dapat mempengaruhi interpretasi dokumen hukum. Selain itu, sumber-sumber hukum seperti konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan dapat digunakan untuk mendukung argumen dalam jurnal ini. Dalam analisis aspek legal, konsekuensi penggunaan bahasa baku juga harus diperjelas, termasuk potensi sanksi atau interpretasi yang salah jika bahasa tidak digunakan dengan benar dalam dokumen hukum.

Dalam pandangan lebih luas, penting untuk diingat bahwa bahasa baku bukan hanya masalah tata bahasa semata, tetapi juga melibatkan konteks budaya, sosial, dan politik. Penggunaan bahasa yang tidak teratur dan tidak tepat tentu saja akan menyulitkan pendengar serta pembaca untuk dapat saling berkomunikasi. Keteraturan dan ketepatan dalam berbahasa pasti akan memerlukan pemahaman dan pengetahuan yang sangat luas dan mendalam mengenai ilmu kebahasaan (Nurhayati, et al, 2023). Oleh karena itu, penulis jurnal ini juga perlu merinci bagaimana konsep bahasa baku dapat berbeda dari satu negara atau sistem hukum ke negara atau sistem hukum lainnya. Dengan memahami pentingnya bahasa baku dalam dokumen hukum dan implikasinya, diharapkan bahwa jurnal ini dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang bagaimana menjaga integritas dan kejelasan hukum dalam sistem hukum yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Metode deskriptif kualitatif dipilih untuk menekankan interpretasi dan pemahaman yang mendalam terhadap dinamika kompleks antara bahasa baku dan konteks legal. Analisis kualitatif memberikan ruang untuk menggali nuansa linguistik dan hukum yang mungkin terlewatkan dalam pendekatan kuantitatif. Dengan fokus pada analisis kualitatif, penelitian ini berupaya merinci dan mendeskripsikan secara holistik bagaimana bahasa baku memainkan peran kunci dalam mempengaruhi validitas dan efektivitas dokumen hukum. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pandangan dan pengalaman para ahli bahasa dan praktisi hukum melalui wawancara mendalam. Pemahaman tambahan yang dihasilkan dari wawancara diharapkan dapat memberikan dimensi yang lebih kaya pada pemahaman tentang kompleksitas hubungan antara bahasa baku dan aspek legal dalam dokumen hukum. Oleh karena itu, penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif dipandang sebagai langkah yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian yang membutuhkan pemahaman mendalam terkait pentingnya bahasa baku dalam konteks hukum.

Pemilihan metode penelitian deskriptif kualitatif juga mencerminkan keinginan peneliti untuk mengeksplorasi konteks yang berkaitan dengan bahasa baku dalam dokumen hukum, serta untuk menggali pemahaman tentang bagaimana aspek linguistik ini dapat memberikan kontribusi pada kejelasan dan keabsahan norma-norma hukum. Dengan menghadirkan perspektif kualitatif, penelitian ini berusaha untuk mengatasi keterbatasan metode kuantitatif yang mungkin tidak dapat sepenuhnya menangkap kompleksitas dan konteks unik terkait dengan penggunaan bahasa baku dalam

perundang-undangan. Selanjutnya, pendekatan deskriptif kualitatif ini memfasilitasi analisis mendalam terhadap bagaimana bahasa baku dapat menciptakan atau mempengaruhi interpretasi hukum. Ini melibatkan pengamatan terhadap istilah-istilah kunci, frasa, dan struktur kalimat yang dapat memainkan peran signifikan dalam menentukan arti dan dampak legal dari suatu dokumen. Oleh karena itu, melalui pendekatan ini, penelitian berharap dapat mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin tidak terdeteksi melalui pendekatan analisis yang lebih terkonsentrasi pada data kuantitatif.

Selanjutnya, penelitian ini mengamati bahwa penggunaan metode deskriptif kualitatif memungkinkan inklusivitas dan fleksibilitas dalam pengumpulan data. Analisis dokumen yang mendalam dan wawancara dengan ahli bahasa dan praktisi hukum diintegrasikan untuk mendapatkan pemahaman holistik yang lebih lengkap dan kontekstual terkait dampak bahasa baku dalam dokumen hukum. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk menangkap kompleksitas subjek secara lebih komprehensif, menciptakan ruang bagi pemahaman mendalam tentang kerangka kerja legal yang dibentuk oleh bahasa baku. Dalam keseluruhan, pemilihan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan untuk memahami implikasi bahasa baku dalam dokumen hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk merinci dan menjelaskan fenomena ini secara holistik. Melalui kombinasi analisis dokumen dan wawancara, penelitian ini berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara bahasa dan hukum, dengan dampak langsung pada pengembangan dan penerapan dokumen hukum yang lebih efektif dan sah secara linguistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan keberlakuan dokumen hukum dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk pemilihan bahasa yang digunakan dalam penyusunannya. Pemilihan bahasa dalam konteks hukum bukanlah sekadar urusan linguistik

semata, melainkan memiliki implikasi yang mendalam terhadap interpretasi, kejelasan, dan kepastian hukum. Sebuah dokumen hukum yang dirumuskan dengan bahasa yang tepat dan jelas dapat meminimalkan risiko terjadinya ambiguitas atau penafsiran ganda, menghasilkan kepastian hukum yang diinginkan.

Penting untuk memahami bahwa bahasa dalam dokumen hukum sering kali memiliki terminologi dan frasa yang sangat spesifik, menciptakan suatu "bahasa hukum" yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap konteks hukum yang bersangkutan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Black (2010) dalam jurnal "Legal Language: A Systemic Functional Linguistics Perspective," penggunaan bahasa hukum yang tepat dan

konsisten diperlukan agar dokumen tersebut dapat mencerminkan maksud hukum yang diinginkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Selain itu, aspek multilingualisme juga dapat menjadi faktor penting dalam menentukan keberlakuan dokumen hukum. Terjemahan dokumen hukum ke dalam berbagai bahasa memunculkan tantangan tersendiri. Menurut studi oleh Johnson (2015) dalam "Challenges in Legal Translation: An Overview," terjemahan yang tidak akurat dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan konsekuensinya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dalam memastikan bahwa terjemahan tersebut tidak hanya mencerminkan makna literal, tetapi juga memahami konteks hukum setiap bahasa yang digunakan.

Konteks budaya juga berperan penting dalam pemilihan bahasa dalam dokumen hukum. Penulisan yang memperhatikan nilai-nilai budaya dapat membantu memastikan bahwa dokumen tersebut tidak hanya mematuhi peraturan hukum, tetapi juga senantiasa mengakomodasi realitas budaya yang melingkupinya. Pemahaman mendalam terhadap budaya dan hukum lokal, seperti yang dibahas dalam penelitian oleh Li (2018) dalam "Cultural Perspectives in Legal Language," dapat menjadi kunci keberhasilan dokumen hukum dalam tabel.

Tabel 1. Kata Legal dan Non-Legal

No.	Baku	Tidak Baku	Legal	Non Legal	Sample
1	Perbuatan (Pasal: 44,45,47,50,51,57,63,64,65,66,Dst.)		✓		KUHP
2	Pemidanaan (Pasal: 14f,36,37,39,76,85,128,137,139,145,153,Dst.)		✓		KUHP
3	Pencurian (Pasal: 362,363,365)		✓		KUHP
4	Pelanggaran (Pasal: 14a,14b,14c,39,45,54,59,60,64,70,70 bis,71,Dst.)		✓		KUHP
5	Pemberatan (Pasal: 18,30,82)		✓		KUHP
6	Pencabutan (Pasal: 10,16,37,38,67,68,85,128,139,145,153,209,Dst)		✓		KUHP
7	Barangsiapa (Pasal: 48,49,113,114,126,219,221,Dst.)		✓		KUHP

Secara keseluruhan, pemilihan bahasa dalam dokumen hukum bukanlah sekadar masalah pilihan kata-kata, melainkan merupakan aspek integral dalam menciptakan

hukum yang jelas, tepat, dan dapat diterapkan dengan efektif. Dengan memahami implikasi linguistik, hukum, dan budaya, penyusunan dokumen hukum dapat menjadi instrumen yang kuat untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan.

Di Indonesia, keberlakuan dokumen hukum sangat dipengaruhi oleh aspek linguistik, hukum, dan budaya yang khas. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dan bahasa hukum nasional, dan penggunaannya diatur oleh undang-undang. Salah satu peraturan yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks hukum adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36, yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara.

Penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen hukum di Indonesia perlu memperhatikan kejelasan, konsistensi, dan akurasi istilah hukum. Pemilihan kata-kata yang tepat dalam bahasa Indonesia dapat menghindari interpretasi ganda dan memastikan bahwa makna hukum yang diinginkan dapat tersampaikan dengan jelas. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Sutedi (2012) dalam "Bahasa dan Undang-Undang di Indonesia," menyoroti pentingnya keterkaitan antara bahasa dan hukum dalam konteks Indonesia.

Selain itu, multilingualisme juga menjadi aspek penting di Indonesia, dengan banyak etnis dan bahasa daerah yang beragam. Dalam beberapa konteks, terutama terkait hukum adat atau lokal, pemilihan bahasa daerah atau terminologi yang sesuai dengan kearifan lokal dapat mendukung keberlakuan dokumen hukum di tingkat lokal. Namun, perlu memastikan bahwa terjemahan antar bahasa tetap akurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Aspek budaya juga menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan bahasa dalam dokumen hukum di Indonesia. Pemahaman mendalam terhadap budaya dan nilai-nilai masyarakat setempat dapat membantu mencegah ketidaksetujuan atau resistensi terhadap implementasi dokumen hukum. Penelitian oleh Rahardjo (2016) dalam "Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pengaruhnya terhadap Pemikiran Hukum Indonesia" menggambarkan betapa pentingnya menyelaraskan bahasa hukum dengan nilai-nilai Pancasila, yang menjadi dasar negara di Indonesia.

Dalam konteks digitalisasi dan aksesibilitas informasi, penting bagi dokumen hukum di Indonesia untuk mempertimbangkan juga penggunaan bahasa yang sederhana dan jelas, sesuai dengan prinsip "plain language." Hal ini dapat memastikan bahwa informasi hukum dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat luas, termasuk mereka yang mungkin tidak memiliki latar belakang hukum formal.

Seiring dengan perkembangan zaman, Indonesia juga terus berupaya untuk

memperbarui regulasi hukumnya agar tetap relevan dan sesuai dengan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, pemilihan bahasa dalam dokumen hukum haruslah mencerminkan semangat adaptasi terhadap perubahan dalam norma hukum dan perkembangan budaya di Indonesia.

Secara keseluruhan, pemilihan bahasa dalam dokumen hukum di Indonesia adalah bagian integral dari proses pembuatan hukum yang efektif dan berkeadilan. Dengan memperhatikan keberagaman bahasa, keterkaitan dengan budaya lokal, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dokumen hukum dapat mencapai keberlakuan yang diinginkan di tingkat nasional.

Penggunaan bahasa non-baku dalam dokumen hukum dapat mengakibatkan sejumlah konsekuensi hukum yang serius. Dalam literatur hukum, terdapat konsensus bahwa kejelasan dan ketepatan bahasa merupakan unsur kunci dalam penyusunan dokumen hukum yang efektif. Sebuah penelitian oleh Adams (2018) yang diterbitkan dalam "Journal of Legal Language" menyoroti pentingnya bahasa yang tepat dan jelas dalam mencegah ketidakpastian hukum. Penggunaan bahasa non-baku, terutama jika tidak konsisten dengan terminologi hukum yang diakui, dapat menciptakan ambiguitas dan meningkatkan risiko terjadinya penafsiran ganda. Hal ini dapat membuka pintu bagi ketidakjelasan hukum yang pada gilirannya dapat memicu perselisihan dan konflik hukum.

Selain itu, penggunaan bahasa non-baku juga dapat menghambat aksesibilitas hukum. Masyarakat umum, terutama mereka yang tidak memiliki latar belakang hukum formal, mungkin mengalami kesulitan dalam memahami dokumen hukum yang menggunakan bahasa yang kompleks atau tidak umum. Studi oleh Chen (2019) dalam "Legal Literacy and Access to Justice" menunjukkan bahwa pemahaman terhadap bahasa hukum merupakan faktor kunci dalam aksesibilitas hukum, dan penggunaan bahasa non-baku dapat menjadi hambatan serius dalam upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif.

Konsekuensi lainnya yang mungkin timbul adalah potensi masalah interpretasi dan perselisihan antarpihak. Jika bahasa yang digunakan tidak memiliki standar baku atau terminologi yang dikenal secara umum, para pihak yang terlibat dalam dokumen hukum tersebut dapat memiliki pemahaman yang berbeda terhadap klausul-klausul tertentu. Studi oleh Smith (2017) dalam "Legal Language: A Comparative Analysis" menunjukkan bahwa perbedaan interpretasi semacam ini dapat menciptakan ketidakpastian yang merugikan dan bahkan membahayakan integritas dokumen hukum.

Penggunaan bahasa non-baku juga dapat memberikan dampak negatif terhadap proses peradilan. Hakim dan praktisi hukum yang harus menafsirkan dokumen hukum

yang menggunakan bahasa non-baku dapat menghadapi kesulitan dalam memutuskan kasus dengan kejelasan dan keyakinan yang diperlukan. Oleh karena itu, risiko ketidakpastian dan kebingungan dalam sistem peradilan dapat meningkat sebagai konsekuensi dari penggunaan bahasa non-baku dalam dokumen hukum.

Dalam upaya untuk mencegah konsekuensi hukum yang merugikan ini, penting bagi para penyusun dokumen hukum untuk mematuhi standar bahasa baku yang telah ditetapkan dalam konteks hukum yang berlaku. Upaya untuk menjaga kejelasan, konsistensi, dan aksesibilitas bahasa hukum merupakan langkah kritis dalam memastikan bahwa dokumen hukum dapat mencapai tujuan keberlakuannya dan mendukung integritas sistem hukum secara keseluruhan.

Selain dampak yang telah disebutkan, penggunaan bahasa non-baku dalam dokumen hukum juga dapat menciptakan tantangan dalam konteks interpretasi norma hukum yang telah ada. Bahasa hukum yang konsisten dan baku membantu memastikan bahwa norma-norma hukum dapat diaplikasikan secara seragam dan dapat dipahami dengan jelas oleh para pihak yang terlibat. Penelitian oleh Johnson (2020) dalam "The Role of Language in Legal Interpretation" menekankan bahwa bahasa yang jelas dan konsisten diperlukan agar hukum dapat diartikan dengan benar dan adil.

Dalam konteks hukum internasional, penggunaan bahasa non-baku dapat menciptakan hambatan komunikasi antarnegara. Terjemahan yang tidak akurat atau penggunaan bahasa yang tidak standar dapat mengakibatkan perselisihan antarnegara, terutama dalam perjanjian internasional. Hal ini diperkuat oleh penelitian oleh García (2018) dalam "Language and Diplomacy: The Impact of Language Choices in International Relations," yang menunjukkan bahwa penggunaan bahasa yang tidak tepat dalam konteks diplomasi dapat mempengaruhi hubungan internasional secara signifikan.

Dampak penggunaan bahasa non-baku juga dapat merambah ke aspek etika hukum. Bahasa hukum yang tidak baku dapat menimbulkan kecurigaan terkait niat dan transparansi para penyusun dokumen hukum. Masyarakat dan pihak terkait dapat menganggap bahwa penggunaan bahasa non-baku adalah upaya untuk menyembunyikan informasi atau menyulitkan pemahaman, yang dapat merusak kepercayaan terhadap sistem hukum dan lembaga terkait.

Dalam era di mana digitalisasi semakin mendominasi, penggunaan bahasa non-baku juga dapat menciptakan tantangan dalam pembuatan dan implementasi regulasi terkait teknologi informasi dan keamanan data. Penelitian oleh Li (2021) dalam "Legal Implications of Digital Language" mencatat bahwa ketidakjelasan dalam bahasa hukum dapat menciptakan celah hukum terkait keamanan data dan privasi di era digital.

Untuk mengatasi potensi konsekuensi hukum yang merugikan akibat penggunaan bahasa non-baku, langkah-langkah konkret perlu diambil. Ini mencakup penyusunan pedoman dan standar penggunaan bahasa hukum yang baku, pelibatan ahli linguistik dalam proses penyusunan dokumen hukum, serta pemberdayaan masyarakat untuk lebih memahami bahasa hukum yang digunakan dalam regulasi. Dengan demikian, upaya ini dapat membantu menjaga kejelasan, konsistensi, dan integritas bahasa dalam dokumen hukum, mendukung keberlakuan hukum, dan memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak diakui dan dihormati dengan benar.

Penggunaan bahasa non-baku dalam dokumen hukum dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih jelas dan mendalam. Salah satu risiko yang signifikan adalah terkait dengan interpretasi yang bervariasi dan potensi ketidakpastian hukum. Ketidakjelasan bahasa dapat membuka ruang bagi penafsiran yang beragam oleh para pihak yang terlibat atau bahkan oleh pihak berwenang, termasuk hakim. Dalam konteks ini, penelitian oleh Smith (2019) dalam "Legal Interpretation and Language Ambiguity" menunjukkan bahwa bahasa yang tidak jelas dapat menciptakan celah hukum yang sulit diatasi, meningkatkan kemungkinan terjadinya perselisihan hukum yang mahal dan memakan waktu.

Penggunaan bahasa non-baku juga dapat memengaruhi keseimbangan kekuasaan dalam hubungan hukum. Jika satu pihak memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap bahasa non-baku yang digunakan dalam suatu dokumen, hal ini dapat memberikan keuntungan yang tidak adil dalam negosiasi atau perselisihan. Asimetri informasi semacam ini dapat merugikan pihak yang kurang familiar dengan bahasa non-baku, menciptakan ketidaksetaraan di antara para pihak yang seharusnya setara di mata hukum.

Konsekuensi lainnya adalah terkait dengan eksekusi dan penegakan hukum. Bahasa non-baku dapat menciptakan hambatan dalam proses hukum, memperlambat penyelesaian kasus, atau bahkan menyebabkan keputusan hukum yang tidak adil. Dalam literatur hukum, ditemukan bahwa dokumen hukum yang menggunakan bahasa yang jelas dan baku dapat mempermudah proses peradilan dan mengurangi risiko ketidakadilan (Cameron, 2017, "Legal Language and Plain Language: An Empirical Study of a Random Sample of Contracts").

Selain itu, aspek etika juga menjadi perhatian serius. Penggunaan bahasa non-baku yang sulit dipahami oleh masyarakat umum dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak transparan dan merugikan bagi kepentingan publik. Ini dapat merugikan integritas lembaga dan proses hukum, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Seiring dengan digitalisasi dan globalisasi, penggunaan bahasa non-baku juga dapat menciptakan hambatan dalam harmonisasi hukum di tingkat internasional. Penerjemahan dokumen hukum yang menggunakan bahasa non-baku dapat menjadi tantangan yang kompleks dan meningkatkan risiko kesalahpahaman di antara negara-negara yang berbeda.

Penggunaan bahasa non-baku dalam dokumen hukum dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi hukum yang substansial. Menyimak literatur hukum mengenai bahasa hukum, penelitian yang dilakukan oleh Black (2018) dalam jurnal "Legal Linguistics Quarterly" menegaskan bahwa kejelasan dan ketepatan bahasa adalah aspek kritis dalam konstruksi dokumen hukum yang efektif. Bahasa non-baku, terutama jika tidak sesuai dengan istilah hukum yang sudah dikenal, dapat menciptakan ambiguitas dan meningkatkan risiko penafsiran ganda. Dampak dari ketidakjelasan semacam ini dapat berpotensi memicu perselisihan hukum yang kompleks dan melibatkan biaya yang signifikan.

Ketidakesuaian bahasa dalam dokumen hukum dengan standar baku juga dapat memberikan konsekuensi terhadap interpretasi norma hukum yang ada. Penelitian oleh Smith (2019) dalam "Journal of Legal Interpretation" menyoroti bahwa bahasa hukum yang konsisten dan baku mendukung aplikasi norma hukum dengan lebih seragam. Penggunaan bahasa non-baku dapat menciptakan hambatan interpretatif yang sulit diatasi, merugikan pihak yang terlibat dan bahkan dapat menyulitkan proses peradilan.

Selain itu, penggunaan bahasa non-baku dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Terutama jika satu pihak memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap bahasa non-baku yang digunakan, asimetri informasi dapat menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Hal ini dapat merusak prinsip kesetaraan dalam kontrak dan perjanjian hukum.

Dalam konteks globalisasi, dampak penggunaan bahasa non-baku juga dapat dirasakan dalam hubungan internasional, terutama dalam konteks perjanjian internasional. Penelitian oleh García (2020) dalam "International Legal Perspectives" mencatat bahwa terjemahan yang tidak tepat atau penggunaan bahasa non-baku dalam perjanjian internasional dapat menimbulkan ketidaksepakatan dan perselisihan antarnegara.

Penting untuk dicatat bahwa penggunaan bahasa non-baku tidak hanya menciptakan tantangan dalam proses pembuatan dan implementasi dokumen hukum, tetapi juga dapat membawa dampak serius terhadap proses peradilan. Bahasa non-baku dapat menghambat kemampuan hakim untuk mengambil keputusan yang tepat dan adil, merugikan integritas sistem peradilan.

Pada tingkat etika, penggunaan bahasa non-baku dapat menimbulkan pertanyaan

mengenai transparansi dan keterbacaan hukum. Masyarakat mungkin sulit untuk memahami dokumen hukum yang menggunakan bahasa non-baku, menciptakan ketidakpercayaan terhadap lembaga hukum dan prosesnya. Hal ini dapat merugikan prinsip akuntabilitas dan responsifitas lembaga hukum terhadap kepentingan publik.

Dalam era digitalisasi dan transformasi teknologi, penggunaan bahasa non-baku juga dapat menciptakan tantangan dalam penyusunan regulasi terkait teknologi informasi dan keamanan data. Penelitian oleh Li (2021) dalam "Digital Legal Frameworks" menyoroti bahwa bahasa yang tidak jelas dalam dokumen hukum dapat menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang bermaksud buruk.

Dengan mempertimbangkan berbagai dampak ini, upaya serius perlu diambil untuk memastikan bahwa dokumen hukum mematuhi standar bahasa baku yang telah ditetapkan. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup konsultasi dengan ahli linguistik hukum selama proses penyusunan dokumen, penyelenggaraan pelatihan bagi praktisi hukum dalam penggunaan bahasa baku, dan pelibatan masyarakat melalui program literasi hukum. Dengan demikian, dokumen hukum dapat menjadi alat yang efektif dalam mencapai tujuan hukumnya dan mendukung integritas sistem hukum secara keseluruhan.

Dampak dari penggunaan bahasa non-baku dalam dokumen hukum juga dapat merambah ke aspek global dan internasional. Bahasa non-baku dapat menjadi hambatan dalam harmonisasi hukum di tingkat internasional, terutama ketika terjemahan yang akurat menjadi sulit. Kesulitan dalam menerjemahkan dan mengartikan dokumen hukum yang menggunakan bahasa non-baku dapat memperumit proses negosiasi dan implementasi perjanjian antarnegara, meningkatkan risiko ketidaksepahaman dan perselisihan.

Secara etis, penggunaan bahasa non-baku juga dapat menimbulkan pertanyaan tentang inklusivitas dan keadilan. Bahasa hukum yang sulit dipahami dapat membuat masyarakat awam kesulitan untuk memahami hak dan kewajiban mereka. Penelitian oleh Robertson (2018) dalam "Access to Justice and Legal Literacy" menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum yang rendah dapat menghambat akses masyarakat terhadap keadilan, menciptakan ketidaksetaraan dalam sistem hukum.

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan keanekaragaman budaya dan bahasa daerah, penggunaan bahasa non-baku dapat menciptakan tantangan tambahan. Terjemahan yang tidak akurat atau penggunaan istilah yang tidak sesuai dengan konteks lokal dapat menimbulkan kesalahpahaman dan mengganggu implementasi dokumen hukum di tingkat lokal. Penelitian oleh Soedjadi (2017) dalam "Legal Multilingualism in Indonesia" menyoroti kompleksitas penggunaan bahasa dalam konteks hukum Indonesia yang melibatkan berbagai bahasa daerah dan budaya.

Selain konsekuensi yang telah diuraikan, penggunaan bahasa non-baku dalam dokumen hukum juga dapat menciptakan tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Keterbatasan pemahaman terhadap bahasa non-baku oleh aparat penegak hukum dapat menghambat upaya penindakan terhadap pelanggaran hukum dan dapat menciptakan celah bagi praktik-praktik yang merugikan.

Untuk mengatasi konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat penggunaan bahasa non-baku, penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip bahasa baku dalam proses penyusunan dokumen hukum. Langkah-langkah konkrit dapat melibatkan pelibatan ahli linguistik dan praktisi hukum selama proses penyusunan, pengembangan pedoman penggunaan bahasa baku, dan peningkatan literasi hukum masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan bahwa dokumen hukum dapat mencapai keberlakuan dan keadilan yang diinginkan tanpa menimbulkan risiko interpretasi yang merugikan dan mengganggu integritas sistem hukum secara keseluruhan.

Dalam mengatasi tantangan penggunaan bahasa non-baku dalam dokumen hukum, perlu diperhatikan juga peran teknologi. Penggunaan teknologi, termasuk aplikasi kecerdasan buatan (AI) dan alat bantu terjemahan otomatis, dapat membantu memfasilitasi terjemahan yang lebih akurat dan menyederhanakan istilah hukum. Penelitian oleh Huang et al. (2022) dalam "Technological Advancements in Legal Translation" mengamati perkembangan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas terjemahan dan mengatasi hambatan bahasa dalam konteks hukum.

Selain itu, penting untuk menciptakan kebijakan yang mendukung penggunaan bahasa baku dalam dokumen hukum. Pemerintah, lembaga hukum, dan organisasi terkait dapat berperan dalam menyusun regulasi dan pedoman yang mendorong penggunaan bahasa baku. Penelitian oleh Leflar (2019) dalam "Legal Language Policies in Comparative Perspective" menyoroti pentingnya kebijakan yang mengatur penggunaan bahasa dalam sistem hukum untuk menciptakan konsistensi dan kejelasan.

Pendidikan hukum juga dapat menjadi kunci untuk mengatasi konsekuensi hukum dari penggunaan bahasa non-baku. Program literasi hukum yang mencakup pemahaman bahasa hukum dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bahasa baku dalam dokumen hukum. Studi oleh Jurafsky (2018) dalam "Legal NLP: Can Natural Language Processing and Machine Learning Help Solve the Legal Profession's Problems with Language?" mengeksplorasi peran pendekatan pemrosesan bahasa alami dalam membantu pemahaman hukum.

Dalam konteks regulasi hukum yang melibatkan keanekaragaman bahasa dan budaya di Indonesia, pendekatan yang memperhitungkan multilingualisme dan

keberagaman dapat mendukung implementasi dokumen hukum secara inklusif. Kebijakan yang mempertimbangkan bahasa daerah dan kearifan lokal dapat menciptakan keseimbangan antara standarisasi bahasa dan keberagaman kultural, sejalan dengan semangat kesatuan dan keberagaman bangsa Indonesia.

Dengan mengintegrasikan teknologi, perumusan kebijakan, pendidikan hukum, dan pendekatan inklusif, diharapkan bahwa konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat penggunaan bahasa non-baku dalam dokumen hukum dapat diminimalkan. Pencapaian keberlakuan dan kejelasan dalam hukum menjadi lebih mungkin, mendukung integritas sistem hukum, serta memberikan akses dan keadilan bagi masyarakat secara menyeluruh.

SIMPULAN

Keberlakuan dokumen hukum yang optimal sangat tergantung pada pemilihan bahasa yang digunakan dalam penyusunannya. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, melainkan juga pilar fundamental yang membentuk dasar pemahaman, interpretasi, dan implementasi hukum. Kejelasan dan ketepatan bahasa dalam dokumen hukum merupakan landasan esensial untuk menjamin keberlakuan hukum dan keadilan. Penggunaan bahasa yang tidak tepat, ambigu, atau tidak konsisten dapat merugikan proses hukum dan menciptakan risiko ketidakpastian. Bahasa yang jelas dan sesuai adalah kunci utama dalam memastikan keberhasilan suatu dokumen hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams. (2018). "Journal of Legal Language".
- Black. (2010). "Legal Language: A Systemic Functional Linguistics Perspective.
- Cameron. (2017). *Legal Language and Plain Language: An Empirical Study of a Random Sample of Contracts.*
- Chen. (2019). *Legal Literacy and Access to Justice.*
- Eni Nurhayati, Laila Fitriani, Zaskia Salsabilla Rachma, Aisyah Dhia Kamila, Eka Putri Pebrianti, & Salesa Amilia Fateha. (2023). *Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Media Sosial Sebagai Media Pemasaran Online.*
- Eni Nurhayati, Selvi Alvionita, Rosa Novarian Agninditya Nugraha, Cheryl Azalia, M Daffa Faiq, & M Zidhan Nurul Huda. (2023). *Analisis Penggunaan Bahasa Slang Di Lingkungan Mahasiswa Progam Studi Teknik Industri UPN VETERAN Jawa Timur.*
- Garcia. (2018). *Language and Diplomacy: The Impact of Language Choices in International Relations.*
- Garcia. (2020). *International Legal Perspectives.*

- Huang. (2022). Technological Advancements in Legal Language Policies in Comparative Perspective.
- Jhonson. (2015). Challenges in Legal Translation: An Overview.
- Johnson. (2020). The Role of Language in Legal Interpretation.
- Jurafsky. (2018). Legal NLP: Can Natural Language Processing and Machine Learning Help Solve the Legal Profession's Problems with Language.
- Li. (2018). Cultural Perspectives in Legal Language.
- Li. (2021a). Digital Legal Frameworks.
- Li. (2021b). Legal Implications of Digital Language.
- Rahardjo. (2016). Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pengaruhnya terhadap Pemikiran Hukum Indonesia.
- Robertson. (2018). Access to Justice and Legal Literacy.
- Smith. (2017). Legal Language: A Comparative Analysis.
- Smith. (2019a). Journal of Legal Interpretation.
- Smith. (2019b). Legal Interpretation and Language Ambiguity.
- Sutedi. (2012). Bahasa dan Undang - Undang di Indonesia.